

PENERAPAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DI KANTOR PENGADIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Yenny Nurhidayah

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
Corresponding Author: yennynurhidayah22@gmail.com

Dadang Mashur

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
e-mail: dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

Application Electronic Government at the Pekanbaru City Religious Court Office is implementation service public with use technology information and communication in give service to public for manifest in the Religious Courts of the Bureaucratic Region Clean and Serving (WBBM). However, on implementation application Electronic Governance this still there is the problem that becomes obstacles on implementation, such as Allocation Source power humans who haven't equally and lack of sustainable socialization. Study this aim for knowing Application Electronic Governance at the Pekanbaru City Religious Court Office as well as factor the inhibitor. Draft the researcher 's theory use is E-Government theory by Indrajit with six indicator that is E-Strategy, Architecture, Risk and Program Management, Organizational Capabilities, Value Chain Management, and Performance Management. Study use method study qualitative with technique data collection based on interviews, observations, and documentation. The results of the research found are the application of Electronic Government at the Pekanbaru City Religious Court which has been carried out optimally, that the implementation of e-government provides convenience to the community. Inhibiting factors are the unequal allocation of human resources, lack of socialization and education, and network disturbances. So that it has an influence on the implementation of Electronic Government at the Office of the Religious Courts in Pekanbaru City.

Keywords: *Implementation, E-government, Pekanbaru City Religious Court.*

ABSTRAK

Penerapan Electronic Government di Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru merupakan implementasi pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan di Pengadilan Agama Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Akan tetapi, pada pelaksanaan penerapan Electronic Government ini masih ada permasalahan yang menjadi kendala pada pelaksanaannya, seperti Pengalokasian Sumber daya manusia yang belum merata dan kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Electronic Government di Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru serta faktor penghambatnya. Konsep teori yang peneliti gunakan adalah teori E-Government oleh Indrajit dengan enam indikator yaitu E-Strategy, Architecture, Risk and Program Management, Organizational Capabilities, Value Chain Management, dan Performance Management. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang ditemukan adalah Penerapan Electronic Government di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang dilaksanakan sudah optimal bahwasannya penerapan e-government itu memberi kemudahan kepada masyarakat. Faktor penghambat yaitu pengalokasian sumber daya manusia yang belum merata, kurangnya sosialisasi dan edukasi, dan gangguan jaringan. Sehingga hal tersebut memberikan pengaruh terhadap penerapan Electronic Government di Kantor Pengadilan Agama di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Penerapan, E-government, Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mandiri dan mengatasi beberapa persoalan yang dihadapi daerah, termasuk persoalan dalam pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pembaharuan dalam pengelolaan pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Setiap pelayanan publik pada prinsipnya harus memuat sebuah hal yang baru, karena bagi pemerintah daerah peluang untuk menciptakan hal yang baru sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing menjadi terbuka lebar melalui kebijakan otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 386 sampai pasal 387 menggambarkan pentingnya pemerintah daerah untuk melakukan inovasi daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam melakukan inovasi ada beberapa prinsip yang harus dijalankan, yakni: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas,

perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Teknologi informasi yang semakin maju sebagai bagian dari globalisasi menuntut pemerintah sebagai penyedia layanan melakukan perubahan pada pola pelayanan agar lebih bersifat efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Oleh sebab itu pemerintah harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pelayanan berjalan secara maksimal.

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru merupakan salah satu Pengadilan Agama yang berada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang menerapkan jenis pelayanan publik berbasis *e-government* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan *e-government* dan konsep *Smart City* Madani meliputi Aplikasi Sigrasi, Sidexspro, Pengambilan Sisa Panjar Online, dan Sidang teleconference.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, *Electronic Government* pada Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Pasalnya Sumber Daya Manusia yang belum merata sehingga pada proses pelayanan kurang efektif dan efisien. Kemudian gangguan jaringan yang tidak stabil sehingga dalam pelayanan tertentu seperti Sidexspro dan Sidang Teleconference akan tertunda dan tidak selesai tepat waktu. Selanjutnya Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan dari pihak pengadilan agama kota pekanbaru sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui inovasi berbasis *E-government* yang ditawarkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Sugiyono (2011:11) memaparkan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain, yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis juga dengan kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Strategy

Aspek ini menjadi hal pertama yang harus dikaji terlebih dahulu, yakni pada level strategis dengan mencoba menganalisa seberapa jauh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru memiliki keseriusan untuk memahami, menginginkan, serta adanya mengenai e-gov yang hendak diimplementasikan.

Berdasarkan hasil yang peneliti lakukan langsung dilapangan, dapat dilihat dalam pengalokasian Sumber Daya Manusia dimana staff yang ada masih sama dengan sebelum diterapkannya inovasi tersebut sehingga menjadikan kinerja sumber daya manusia di pengadilan agama kurang efisien dalam pelayanannya.

Architecture

Aspek kedua yang perlu pula untuk dikaji adalah yang berhubungan dengan arsitektur sistem dan teknologi informasm,i yang dimiliki saat ini di Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana sarana dan prasarana dalam menerapkan pelayanan berbasis e-governace di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam aspek ini masih terdapat kendala pada jaringan selama menjalankan inovasi meliputi sidexspro dan sidang teleconference.

Risk and Program Management

Aspek selanjutnya adalah sehubungan dengan manajemen proyek e-Government beserta resiko yang dihadapi dalam proses pengembangan dan implementasinya. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana kesiapan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memonitor jalannya inovasi berbasis *e-government*.

Pada aspek ini penerapan inovasi berbasis *E-Government* di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan kaidah-kaidah buku standar sehingga inovasi yang diterapkan lebih terstruktur dan Pengadilan Agama juga sudah memantau berbagai risiko yang ditimbulkan sebelum diterapkannya pelayanan berbasis *e-government* tersebut.

Organizational Capabilites

Aspek ini erat kaitannya dengan kemampuan dari pihak-pihak internal yang ada didalam system di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru untuk beradaptasi dengan konsep organisasi baru yang ditawarkan *e-Government*. Maka dari itu penulis ingin mengetahui pemahaman seperti apa yang Pengadilan Agama berikan untuk sumber daya manusia dalam beradaptasi dengan konsep *e-government*. Sumber daya manusia yang kurang di Kantor Pengadilan Agama mengakibatkan staff memegang dua tanggung jawab sehingga kinerja yang dihasilkan tidak berjalan secara maksimal.

Value Chain Management

Aspek ini berhubungan dengan kemampuan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam mengelola rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk atau pelayanan di dalam sistem *e-Government*. Maka dari itu penulis ingin mengetahui sejauh apa Pengadilan Agama Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan dengan sistem *e-government*. Dalam menjalankan

inovasi Pengadilan Agama menyediakan survey kepuasan masyarakat serta survey persepsi korupsi untuk memaksimalkan inovasi yang dijalankan.

Performance Management

Aspek terakhir yang perlu diperhatikan keberadaannya adalah berhubungan dengan kemampuan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam menentukan dan mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program *e-Government* yang ada. Maka dari itu penulis ingin mengetahui apa yang sudah dihasilkan Pengadilan Agama Pekanbaru dan stakeholder lainnya dalam menerapkan inovasi berbasis *e-government*. Dalam memantau manfaat inovasi Pengadilan Agama mengadakan rapat selama tiga bulan sekali untuk membahas kendala yang terjadi.

PENUTUP

Hasil penelitian dan analisa tentang Penerapan *Electronikc Government* di Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang sudah penulis lakukan memberikan beberapa kesimpulan dan saran antara lain;

1. Penerapan E-government dalam pelayanan publik yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sudah optimal bahwasannya penerapan e-government itu memberi kemudahan kepada masyarakat, hasil tersebut diukur dari 6 indikator yang membahas permasalahan yang ada pada Penerapan E-government dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun dapat dilihat dari dua indikator yaitu indikator e-strategy dimana terdapatnya pengalokasian sumber daya manusia yang belum merata, kedua indikator architecture terdapatnya gangguan jaringan yang disebabkan pada pengurusan inovasi sidexspro dan sidang teleconferencedalam penerapan E-government.
2. Faktor penghambat yang menjadi kendala pada proses penerapan E-government di Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru adalah belum meratanya pengalokasian sumber daya manusia terkait inovasi yang diterapkan sehingga pada proses pelayanan kurang efisien dan efektif. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan dari pihak pengadilan agama kota pekanbaru sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui inovasi berbasis E-government yang ditawarkan. Selain itu kendala yang dirasakan pengadilan agama yaitu jaringan internet yang tidak stabil sehingga dalam pelayanan tertentu akan tertunda dan tidak selesai tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ilham, S. M. (2021). E-Governance. Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA

Jurnal :

Antarini, I. G. (2020). Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government). Publik Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 3

Bungin & Burhan. (2008). Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group.

Creswell, John W. 2017. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi 4. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Gunawan, R. (2021). Penggunaan Video Conference Pada Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 11-14.

Indrajit, Richardus Eko. 2004. Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi). Yogyakarta: Andi

Indrajit, Richardus Eko. 2005. Electronic Government In Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia. Yogyakarta: Andi

Kurniawan, T. (2006). Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Good Governance melalui Penerapan E-Government di Indonesia. Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi, 1-5.

Maryam, N. S., & Program. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, VI(1). <https://doi.org/10.31845/jwk.v21i2.133>

Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

n, L. K. (2020, desember Kamis). Diambil kembali dari <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>: <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/Use>.

Oktavya, A. A. (2015). Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang. Jurnal Ilmu Pemerintahan, volume 3(3), hlm. 1437.

Sosiawan, E. A. (2008). Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia. Seminar Nasional Informatika, 2008(semnasIF), 99-108.

Dokumen :

Pasal 57 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Peraturan pemerintah RI No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Undang- Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal
386 sampai pasal 387.